



Peace Building berbasis Komunitas Lokal dalam Membangun Kebersamaan antar Agama

Dwi Setianingsih

UIN Sunan Ampel Surabaya

dwisetia_asih@yahoo.co.id

Abstrak: Istilah “peace building” banyak mengemuka dalam diskursus akademis akhir-akhir ini. Penggunaan istilah ini mengemuka terlebih dahulu karena diperkenalkan oleh para aktivis yang bekerja pada komunitas yang sedang konflik, baik konflik terbuka (manifest conflict) maupun konflik tertutup (latent conflict). Dengan demikian, tidak mengherankan apabila istilah peace building selalu dikaitkan dengan kata “konflik.” Sebab, dalam kenyataannya, kerja-kerja peace building mengemuka karena memang lahir dan muncul akibat konflik di suatu masyarakat. Kenyataan konflik ini menghadirkan pemikiran perlunya promosi perdamaian dan mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmonisasi sosial, dan seterusnya. Dalam perkembangannya, kehadiran peacebuilding mendapat kritik seiring dengan ruang dan waktu. Sebagai sebuah konsep, peacebuilding dikenalkan dalam kerangka membangun budaya damai ditengah area konflik maupun perang. Peacebuilding senantiasa diartikulasi sebagai sebuah proses intervensi melainkan bukan pemberdayaan. Apalagi pendekatan yang dilakukan selama ini hanya seremonial saja, misalnya dialog lintas agama, seminar, pelatihan dan workshop. Tanpa menegasikan kontribusi pendekatan tersebut dalam membangun perdamaian, perlu ada pendekatan yang lebih ramah lingkungan; yaitu berbasis komunitas lokal.

Kata Kunci: Peace Building, Komunitas Lokal, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Pada tataran konseptual, tujuan *peace building* sejatinya tidak terbatas pada penghentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Konsep ini mencakup kerja-kerja luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun paska konflik. Selama konflik berlangsung, kerja-kerja *peace building* memang diarahkan pada intervensi konflik melalui mediasi, fasilitasi, dan rekonsiliasi agar konflik eskalasinya dapat dipersempit, dilokalisasi, diredam, bahkan

dihentikan secara total.¹ Kerja-kerja seperti ini biasa disebut sebagai kerja manajemen konflik atau resolusi konflik dalam jangka waktu pendek dengan ditandai dengan proses serta tahapan mendekonstruksi struktur kekerasan yang sedang terjadi.

Tidak terlalu mudah menegaskan lingkup dan kerangka waktu proses *peace building*. Sebagian besar konsep *peacebuilding* merujuk pada pengertian sempit, misalnya "perdamaian negatif" (*negative peace*), dan oleh sebab itu memusatkan perhatiannya pada berbagai upaya untuk meredam konflik bersenjata itu.² Bahkan definisi UN (1992), misalnya, memahami *peacebuilding* sebagai proses untuk menghentikan konflik kekerasan berskala besar dan mencegah kemungkinan kembali merebaknya konflik kekerasan itu.³ Jika merujuk pada konsepsi utama, jarang ditemukan definisi *peace building* yang menjangkau tujuan untuk membangun perdamaian positif (*positive peace*) seperti dimaksud oleh John Galtung. Akademisi yang konsentrasi terhadap masalah konflik dan perdamaian Johan Galtung seorang intelektual Amerika yang selama ini konsentrasi terhadap studi perdamaian sejak 1953. Selain menjadi akademisi, Galtung juga menjadi aktivis gerakan perdamaian. Ketika Amerika melakukan invansi militer ke Irak, Galtung mengirim surat langsung ke Presiden AS agar mengubah kebijakan politik luar negerinya yang hegemonik dan imprealistik. Galtung mengemukakan konsep perdamaian positif; Situasi tiadanya segenap masalah struktural yang dapat menebar benih ketidakpuasan sehingga menyulut konflik, untuk membedakan dari pengertian yang lebih terbatas. Konsepsinya yang lain, perdamaian "negatif", menggambarkan damai semata-mata sebagai ketiadaan konflik kekerasasn. Antara keduanya menyediakan berbagai kondisi, baik jika dilihat dari gerakan dari damai menuju konflik (*eskalasi*) maupun sebaliknya, dari konflik menuju damai (*deeskalasi*).⁴

Kondisi paska konflik, kerja *peace building* lebih diarahkan kepada tujuan perubahan sosial jangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur sosial damai akibat konflik yang telah memporak-porandakan tatanan

¹ Untuk mengetahui secara detail mengenai tahapan dalam kerja *peacebuilding* silahkan lihat dalam Wood, Bernard, *Development Dimensions of Conflict Prevention and Peace Building*, (New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-United Development Programe, 2003) dan CRS (pny), *Perangkat Membangun Perdamaian*, (Jakarta: CRS, 2002)

² Kusnanto Anggoro, dkk. *Post-Conflict Peacebuilding*, (Jakarta: ProPatria Institute, 2009), hal.4

³ *Ibid.*, hlm 4

⁴ Lihat Johan Galtung, *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban* (terj. Asnawi dan Syafruddin), (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hal. 21-25

sosial yang sebelumnya establis. ⁵ Oleh sebab itu, peacebuilding merupakan sebuah konsep yang dihadirkan dalam rangka mengikis pertentangan yang terjadi, dan membangun tatanan baik social, budaya, politik, maupun ekonomi.

Watak dasar kerja peace building mencakup area terbuka (*manifest conflict*) dan konflik tertutup (*latent conflict*). Konsep kerja peace building bermain tatkala konflik terbuka selesai dan menapaki wilayah konflik laten. Kerja peace building pada konflik laten ini tidak lain dipahami sebagai kerja perdamaian paska konflik (*post conflict peace building*). Secara konseptual, penekanan kerja *post conflict peace building* berangkat dari keyakinan, bahwa damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang. Damai yang sejati adalah damai yang dinamis, partisipatif, dan berjangka panjang. Ia terwujud manakala nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar dan menjaral di segala lini kehidupan praktis; keluarga, lingkungan sosial sehari-hari, sekolah, komunitas, masyarakat dan negara. ⁶ Atas dasar konsep dasar kerja peace building *post conflict* ini, kerja-kerja perdamaian belum dianggap berhasil manakala belum mewujudkan tatanan sosial yang sepadan atau mendekati ideal sebagaimana sebelum terjadinya konflik atau bahkan lebih baik dari pada sebelumnya.

Pemahaman atas konsep dan teori tentang peace building di atas kiranya cukup memadai untuk menganalisis terhadap berbagai peristiwa dan rentetan konflik horizontal yang terjadi di belahan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terjadi dalam beberapa decade terakhir di Indonesia, gejala konflik yang terjadi menunjukkan intensitas yang mengawatirkan serta melelahkan. Diantara beberapa akar masalah penyebab konflik, isu agama dan etnis, bahkan kedua isu yang bercampur baur menggambarkan fenomena yang dominan dari pada akar masalah lain.

Dalam perkembangannya, Agama dan etnisitas menjadi isu sensitive yang kerap kali memicu pertikaian. Sebagai sebuah identitas, masyarakat yang demikian plural dan multikultural, agama dan etnisitas sedang mendapat ujiannya sebagai bagian dari identitas. Jika tidak mampu mempertahankan identitasnya, secara pelan tapi pasti akan tergerus dalam identitas lainnya. Pada gilirannya, akan terjadi pemilahan antara yang *mainstream* dan *non-*

⁵ Abu Bakar, Irfan, *Menuju Paradigma Peace Building Pasca Kekerasan (Review terhadap Kerja-kerja Perdamaian di Daerah Konflik)*, dalam Jurnal Taswirul Afkar, Edisi No. 22 Tahun 2007, hal. 26.

⁶ State of The World Forum, *People Building Peace, 35 Inspiring Stories from Around the World*, International Books, 1999, hal. 22.

mainstream, atau logika *mayoritas* dan *minoritas*. Pendek kata, di tengah kontestasi identitas ini (*agama dan etnisitas*) lambat laun akan menyeret salah satu identitas mengakui kebesaran identitas lainnya. Seiring dengan terbentuknya tatanan tanpa batas (*borderless order*) --yang lazim dikenal dengan era global (*global age*),⁷ tatanan ini tidak saja membawa problem krusial bagi kelangsungan dan keberlanjutan ekonomi, politik dan budaya, melainkan juga problem kedamaian dalam konstruksi besar negara-bangsa (*Nation-state building*). Alih-alih globalisasi juga membawa problem tersendiri bagi keutuhan dan integritas negara-bangsa, tentu saja dibarengi oleh semakin derasnya “negasi” dan “eksklusi” identitas kemajemukan agama, dan bahkan kelangsungan pro-eksistensi kemanusiaan.

Fakta cukup kentara adalah, merebaknya berbagai peristiwa pengeboman puluhan rumah ibadah (Gereja) ditanah air dan peledakan sarana publik, terlebih yang melibatkan para pelaku bunuh diri (*suicide bombers*). Serangkaian peristiwa “kekerasan/teroris” itu tidak semata-mata melibatkan aktor lokal (*lokal designer*) yang berdiri sendiri, tetapi juga sangat kuat dipahami terkait kuat dengan “jaringan kekerasan global/terorisme global” (*global violence networking/global terrorism networking*).⁸

Selama Orde Baru, ragam aliran, kelompok dan sekte keagamaan tidak berani tampil secara vulgar. Orde Baru melakukan cara-cara tertentu agar tidak terjadi upaya perlawanan dari kelompok minoritas. Minoritas tidak mendapat ruang dan memang pemerintahan ini tidak menyediakan kelompok ini. Sehingga, ketidakhadiran minoritas bukan lantaran mereka tidak ada, melainkan sengaja oleh orde baru ditiadakan. Dengan tegas pemerintah melalui kementerian agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Meskipun demikian, selama pemerintah Orde Baru aturan tersebut senantiasa bukan menjadi jaminan bagi kelompok keagamaan lain menuangkan spriritual dan ekspresi keagamaannya

⁷ Jacques Hallak, *Globalization, Human Rights and Education*, (Paris: UNESCO; International Institute for Educational Planning, 1999), hal. hal. 8. Linda Low, “Implications of Globalization for Poverty Reduction Efforts in Asia and the Pasific”, paper is presented at the *Asia and Pasific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Property Reduction*, Manila, *Asian Development Bank* (2001), hal. 2-3.

⁸ Amir Syamsyuddin, “Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan”, *Kompas*, 30 Juli 2004. Tentang dua kutub penerimaan atas labelisasi terorisme ini, lihat. Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan, kebangkitan Global Kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press, 2002), hal. 12.

dengan rasa aman. Sebaliknya, pemerintah menjadi kekuatan otoritatif yang pada gilirannya menjadi control kebenaran agama. Hemat Khaled Aboe el-Fadl (2004) terdapat dua jenis otoritas, yaitu “memangku otoritas” (*being in authority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). Memangku otoritas artinya menduduki jabatan resmi atau structural yang berkewenangan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Pemangku otoritas dipatuhi karena dia memiliki daya paksa.⁹ Reformasi dengan dinamika politik yang lebih terbuka tidak serta merta memberi jalan keluar bagi perdamaian. Buktinya adalah merebaknya berbagai peristiwa pengeboman puluhan rumah ibadah (Gereja) di tanah air dan peledakan sarana publik, terlebih yang melibatkan para pelaku bunuh diri (*suicide bombers*). Kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini ditandai dengan fenomena yang merisaukan. Di satu pihak, terjadi gelombang Islamisasi luar biasa yang ditandai dengan adanya formalisasi syariat Islam di sejumlah daerah dengan berbagai isu yang dipilih, dan dipihak lain terjadi gelombang penyesatan satu aliran keagamaan atas aliran dan ekspresi keagamaan yang lain.¹⁰

Dalam konteks *post conflict peace building*, mengembalikan situasi seperti semula (damai) merupakan tantangan. Kerangka konseptual peacebuilding dituntut menjawab dinamika yang berkembang ditengah masyarakat paska konflik. Pasalnya, situasi paska konflik tentu merampas tatanan budaya, politik, dan ekonomi yang ada dan ini menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan konsep peacebuilding. Apalagi situasi paska aksi kekerasan, bom bunuh diri, penyerangan tempat ibadah dan konflik agama tentu menyisakan persoalan mendalam (*latent conflict*). Kerangka kerja peacebuilding hendaknya mampu menjawab problem krusial tersebut sembari menemukan kerangka konseptual demi mencapai idealitas budaya damai.

Beberapa kalangan juga mengkritisi asumsi bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Asumsi itu sendiri menyebabkan proses *peacebuilding* kerap diisi dengan agenda-agenda sekedar untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mencari penyelesaian konflik secara damai.¹¹ Akibatnya, *peacebuilding* tidak menghiraukan bagaimana harus menghalau akar-akar konflik dan bagaimana membangun masyarakat adil dan makmur, terbebas dari segala bentuk penindasan.

⁹ Khaled Aboe el-Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004), hal. 37

¹⁰ Rumadi, *Mengenal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara*, catatan pengantar dalam Suaedy, Ahmad Dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: the Wahid Institute, 2007), hal. 2

¹¹ Lihat misalnya Henning Haugerudbraaten, *Peacebuilding: Six dimensions and two concepts* (African Security Review Vol. 7 No. 6 (1988)

Lebih dari itu, berbagai usaha telah dilakukan untuk menawarkan berbagai bentuk antisipasi konflik, terutama yang terkait dengan konflik antar agama dan etnis. Pendekatan yang pernah dilakukan adalah dialog antar iman dan lintas agama. Dialog yang melibatkan ormas keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan ini marak dipelopori dan dilakukan oleh para tokoh lintas agama. Bahkan, di beberapa daerah, muncul lembaga lintas agama baru yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, seperti FKUB (forum komunikasi antar umat beragama), dan lain sebagainya.¹²

Walaupun banyak sisi positif sebagai implikasi dialog lintas agama, bukan berarti bebas dari kritik. *Pertama*, kelibatan peserta dalam dialog dan seminar atau loka karya, yang terbatas pada kalangan elit atau tokoh. Selain karena model dialog dan forum membutuhkan tingkat pemahaman dan kapasitas intelektual yang memadai, dalam tradisi masyarakat kita, elit atau tokoh dianggap sebagai representasi massa. Disamping ada nilai positif, model pendekatan ini cenderung menafikan massa yang diwakili.

Kedua, elit atau tokoh yang terlibat sebagian besar bukan pelaku konflik. Mereka adalah tokoh pluralitas, memiliki tingkat intelektual lebih dan sangat menghargai perbedaan. Sehingga, ada kesenjangan psikologis antara masyarakat yang terlibat konflik dengan para tokoh yang mewakili. Konsekuensinya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui proses dialog sering kali mentah ketika disosialisasikan kepada masyarakat. Demikian halnya dengan formulasi konsep yang dihasilkan melalui seminar dan lokakarya, seringkali menemukan hambatan dalam proses implementasinya.

Ketiga, kerja-kerja perdamaian harus diusahakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Artinya, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog dan formulasi konsep melalui seminar dan lokakarya harus berjalan sinergis dengan kerja-kerja konkrit dalam masyarakat.

Dialog-dialog lintas agama sudah cukup. Sekarang, yang paling efektif adalah turun ke basis melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama untuk membangun budaya damai ditengah komunitas plural. Secara sederhana, konsepsi *peace building* yang selama ini dilakukan oleh LSM/pemerintah/Ormas belum memotret kepentingan menyeluruh, justru terjebak pada elitism. Pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung normative dan hanya melibatkan elemen tertentu. Sementara itu, akar masalah senantiasa diabaikan dalam kerja

¹² Lihat Peraturan Bersama Menteri i Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

perdamaian demikian. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi cara pandang (*paradigm*) dalam membangun perdamaian (*peace building*). Sehingga, kerja-kerja perdamaian tidak sekedar seremonial saja, melainkan secara praksis dan mendapatkan apa yang dicita-citakan, yaitu terciptanya budaya damai.

Belajar dari Pengalaman di Pacet

Pacet merupakan salah satu desa di Kabupaten Mojokerto.¹³ Sebagai daerah dataran tinggi dengan pesona wisata pegunungan, Pacet menyedot sedikit wisatawan asing dan sebagian besar wisatawan dalam negeri. Kehadiran para wisatawan tentunya ingin mendapat angin segar dan menikmati keindahan pemandangan pegunungan. Seiring dengan perkembangan dunia pariwisata, di desa Pacet juga bermunculan villa dan hotel yang senantiasa memanjakan pengunjung.

Oleh sebab itu, fenomena urbanisasi ke Pacet layaknya kota besar tidak terhindarkan. Meskipun frekwensi tidak sebesar kota Surabaya, pelan tapi pasti proses urbanisasi tersebut mengantarkan pada babak baru sosio-kebudayaan masyarakat Pacet. Bukan hanya sekedar berpariwisata, sebagian besar mereka bekerja di Hotel dan Villa, sebagian lagi mereka (urban) memang menetap di Pacet. Dalam perkembangannya, terjadi transformasi nilai baru dalam kehidupan sosio-keagamaan.

Lebih jauh, Pacet merupakan desa dengan tingkat pluralitas yang cukup tinggi. Meskipun mayoritas masyarakat disana adalah Muslim, kehadiran beberapa tempat ibadah umat Kristen dan Katolik menjadi bukti adanya pluralitas beragama. Sebagai komunitas masyarakat pedesaan, pandangan keagamaan masyarakat tentunya masih relative masih rendah dan kerap kali mengalami *shock cultural*. Alih-alih keberagaman ini menjadi pelangi yang tampil penuh warna dan keindahan, justru dalam pengalaman sejarah sosio-keagamaan di Pacet pernah terjadi gesekan antar umat beragama. Pacet pernah mengalami konflik terbuka di masa lalu. Benturan fisik dan korban jiwa manusia menjadi catatan buruk yang bertahun-tahun mengendap dalam memory masyarakat di sana. Walaupun dalam dua dasawarsa ini Pacet dalam kondisi aman dan kondusif, namun memory konflik terbuka mengendap menjadi konflik laten yang belum pernah ada ujung penyelesaiannya. Di era abad XXI ini, tercatat peristiwa siswa muslim sekolah di SMP Santo Yusuf yang tidak memberi ruang (Muslim) setiap jum'at. Meskipun akhirnya ada keleluasaan pihak sekolah memberi alokasi waktu bagi siswa Muslim, hal ini

¹³ [http: www.Mojokertokab.go.id](http://www.Mojokertokab.go.id)

tentu memberi implikasi bagi perspektif masyarakat terhadap keberagaman. Secara sederhana proses peristiwa ketegangan di Pacet adalah sebagai berikut; *Pertama*, Anak orang Islam banyak yang sekolah di Sekolah Kristen Santo Yusuf. Gejala ini ditanggapi negatif oleh salah satu guru ngaji. Tetapi ketegangan ini tidak berlanjut pada konflik, karena diselesaikan secara arif melalui fasilitasi tokoh setempat. *Kedua*, anak-anak muslim yang sekolah di Santo Yusuf tidak diberi waktu untuk melakukan sholat Jum'at. Akhirnya, melalui negosiasi antara tokoh masyarakat dan pihak sekolah, membuahkan hasil yaitu dengan memberi kesempatan anak muslim untuk melakukan sholat Jum'at. *Ketiga*, keberadaan orang-orang yang memakai jilbab besar –disinyalir kelompok Islam eksklusif- ke masjid tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga masyarakat langsung mengusir mereka. *Keempat*, pernah ada kelompok islam tertentu dari Jakarta yang membawa beberapa anak muda Pacet untuk dididik. Tetapi, setelah kembali dari Jakarta mereka tidak menampakkan aktifitas yang merugikan bagi harmonisasi antar beragama. *Kelima*, adanya pemaksaan agama kepada pemeluk agama lain. Disamping itu juga terjadi pemaksaan dalam aliran agama tertentu untuk masuk aliran lain dengan menjanjikan imbalan. Potensi semakin menguat karena melihat kondisi Desa Pacet dengan struktur masyarakat yang masih menyimpan potensi munculnya ketegangan. *Pertama*, adanya tokoh agama yang masih berwawasan kontra-pluralisme. Kondisi ini menjadi peluang meningkatnya ketegangan jika menggapai banyaknya anak muslim yang sekolah di Santo Yusuf. *Kedua*, Tidak terdapatnya forum komunikasi antar umat beragama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan budaya damai ke seluruh elemen masyarakat. *Ketiga*, Sumber daya manusia (SDM) sebagian masyarakat relatif rendah, sehingga kurang memiliki kemandirian dalam menanggapi perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. *Keempat*, Kesenjangan ekonomi cukup tinggi antara petani dan para pendatang yang membangun villa di Pacet. Apalagi, dengan harga dan produk pertanian belakangan ini menurun drastis, kesejahteraan petani memprihatinkan.¹⁴

Watak konflik di Pacet merupakan *latent conflict*, maka di sinilah peran *post conflict peace building*. Jika mencermati kronologi gesekan tersebut maka berbagai upaya dialog sudah pernah dilakukan; baik atas inisiasi tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah desa. Bahkan, pertemuan antar agama

¹⁴ Lihat Rubaidi, Ahmad, dkk. *Jalan Lain Perdamaian; Peace Building Berbasis Komunitas* (Surabaya: Yayasan FLA Jatim Press, 2005), hal., 10

ini merupakan pertama kali dalam sejarah hidup perdampungan di Pacet. meskipun telah melakukan dialog dan melahirkan kesepakatan, konflik yang berkembang tidak cukup sampai disini, masih ada pekerjaan rumah yaitu *latent conflict*.

Jenis konflik laten adalah konflik yang sangat berbahaya, sebab jika ada pemicu maka akan mengantarkan pada konflik terbuka. Sebaliknya, konflik terbuka senantiasa mengantarkan pada konflik laten dan seterusnya. Mencermati watak konflik yang terjadi di Pacet demikian, Yayasan Lintas Agama (YLA) Jawa Timur bekerjasama dengan Catholic Relief Center (CRS) Jogjakarta secara signifikan melakukan melakukan kerja-kerja mediasi dengan pendekatan Peace building.

Keberlangsungan program peace building di Pacet berjalan mulai tahun 2004 hingga 2008. Proses desiminasi program peacebuilding bukan tanpa tantangan, justru masalah senantiasa menghampiri perjalanan kerja perdamaian ini. Elemen kelompok keagamaan yang memiliki pandangan keagamaan konservatif, bahkan radikal adalah salah satu kendala di lapangan. *Main set* memory kelam konflik manifest masa lalu di antara warga dan tokoh antar agama adalah bagian lain dari kelompok penentang terhadap mediasi yang dilakukan oleh YLA. Varian-varian muslim konservatif dan non muslim yang berpandangan sama ditemui di antara warga Pacet. Salah satu indikator ditemukannya kelompok Islam "militan" ini ditandai dengan adanya salah satu warga di dusun Claket, Pacet, Mojokerto, yang menyediakan rumahnya sebagai tempat persembunyian sementara Nurdin M. Top, seorang buron teroris nomor wahid di Indonesia 2005. Nurdin M. Top seperti diberitakan oleh media massa pernah bersembunyi pada bulan Juli 2005 di rumah ustadz Joni Ahmad Fauzi, pengasuh Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Cabang Pacet. Lihat: Kompas, 11 Juli 2005 dan Harian Surya, 10 Juli 2005. Berangkat dari pengalaman inilah muncul gagasan membangun perdamaian dengan mengkreasikan potensi lokal (*lokal wisdom*) dan berbasis masalah dan problematika yang dihadapi bersama oleh penduduk lokal untuk diangkat ke permukaan agar didialogkan sendiri oleh warga dengan representasi simpul-simpul di antara para warga.

Pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagaimana dimaksud adalah upaya-upaya untuk menggali berbagai nilai tradisi dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam lokal secara arif, bijaksana dan berkelanjutan untuk mendorong keadilan, kesejahteraan dan perdamaian komunitas. Warisan tradisi/budaya lokal seperti "*bersih desa* atau *rumatan desa (sedekah bumi)*", "*rembug desa*", dan tradisi "*nonggo*" (saling berkunjung ke tetangga)

adalah nilai-nilai yang relevan untuk dikembangkan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Pacet.

Inisiasi Pendekatan Berbasis Komunitas

Dialog, diseminasi inklusifitas agama, bahkan kerja-kerja perdamaian adalah upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminir. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas internasional atau etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal-hal ini bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu.¹⁵

Dari kontekstualisasi teoritik *Peace Building* berdasarkan kebutuhan. Pemahaman ini menjadi dasar YLA Jatim untuk menyusun kerangka konsep dan kerja *Peace Building* berbasis komunitas. Mencermati bahwa Pacet sebagai *cover area* program. Pergeseran dan benturan sosial di desa Pacet telah terjadi pada masa lampau. Berdasarkan assessment yang dilakukan YLA Jatim, konflik di Pacet bukan semata masalah pergesekan doctrinal agama, melainkan terdapat motif ekonomi dan keadilan. Tetapi, locus dan *trigger off* utamanya tetapi berbasis pada konflik komunal berbasis pada interpretasi doktrin agama masing-masing, terutama Islam-Kristen. Adanya kesenjangan ekonomi dan fenomena urbanisasi di Pacet mengantarkan pada polarisasi kehidupan sosio-keagamaan. Sementara agama hanya menjadi salah satu pemicu untuk memupuk ketegangan. YLA banyak melakukan kajian pemetaan konflik dan upaya-upaya membangun perdamaian yang mampu menjawab akar masalah. Secara sosiologis, Pacet merupakan daerah pedesaan yang memungkinkan untuk membangun komunitas.

Oleh karena itu, salah satu gagasan yang diusung YLA Jatim adalah *peacebuilding* berbasis komunitas. *Peacebuilding* berbasis komunitas merupakan bagian dari implementasi konsep-konsep perdamaian dalam bentuk kerja konkrit di tengah masyarakat dengan melakukan penyelesaian permasalahan bersama di tingkat lokal. Bukan hanya itu, kerja perdamaian berbasis komunitas ini juga dalam rangka mengkreasikan kearifan lokal (*lokal wisdom*) sebagai kekuatan utama menciptakan budaya damai.

¹⁵Lihat Zainul Abas, "Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian", dalam *Kompas*, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997.

Pertama, tahapan yang paling utama dan pertama-tama yang dilakukan oleh YLA Jatim adalah membangun kesadaran bersama terhadap arti pentingnya mendialogkan konflik laten secara bersama-sama. Penyadaran terhadap implikasi konflik laten ini menghasilkan kesadaran akan munculnya kebutuhan bersama dalam mendialogkan konflik masa lalu yang belum terurai dan diselesaikan sepenuhnya. Bentuk intervensi program pada tahap awal yang dilakukan oleh YLA ini adalah hadirnya kebutuhan bersama dalam menyelesaikan konflik berbasis pada masalah local sehari-hari yang dihadapi oleh warga. Masalah dimaksud adalah problematika kehidupan warga mencakup berbagai hal, mulai dari isu ekonomi, social, pendidikan, pertanian, dan seterusnya. Dalam konteks peace building, masalah local sehari-hari ini lebih diletakkan sebagai sebuah pendekatan untuk menuju pada inti persoalan sesungguhnya, yakni mendialogkan konflik laten itu sendiri.

Kedua, dalam melakukan intervensi program, YLA Jatim terlebih dahulu membentuk komunitas yang terdiri dari representasi agama, tokoh masyarakat, pemuda dan pemerintah desa. Dalam pertemuan ini berbuah kesepakatan perdamaian antar agama dan etnik yang dimanifestasikan melalui “Ikrar Damai”. Selain itu, adanya kesepakatan membentuk komunitas yang pada gilirannya bernama Forum Warga (FW). Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi guna membangun komunikasi, dialog, serta Pencairan hubungan emosional antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Forum Warga ini sangat efektif untuk menjembatani antara pihak yang bertikai untuk menemukan penyelesaian dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok. Terciptanya *common sence* inilah satu-satunya embrio bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai.

Sebagai sebuah organisasi, FW memainkan peranan penting dalam menciptakan budaya damai. Keterlibatan para actor konflik dan stakeholder desa Pacet semakin menemukan legitimasinya bahwa ini merupakan komunitas yang sangat representative. Bukan hanya Muslim, melainkan terdapat juga komunitas Kristen dan khatolik yang saling bekerjasama, berdialog dan berkomunikasi menyelesaikan masalah-masalah lokal. Dalam beberapa decade, relasi horizontal antar warga beda agama yang awalnya tidak pernah berkomunikasi, melalui media FW, di antara stake holder yang pernah terlibat konflik manifest mulai terlihat aktif berdialog, bekerjasama, bahkan bahu membahu, mulai dari merumuskan program hingga melakukan eksekusi program itu sendiri. Relasi kedua kelompok warga beda agama

lambat laun berjalan secara wajar, alami, dan terbuka sekat-sekat psikologis berbasis pada prasangka agama yang selama ini menjadi kendala utama.

Ketiga, karakter intervensi program YLA Jatim adalah buah dialog antara konsep peacebuilding dengan kearifan komunitas (*local wisdom*). Dalam konteks peace building senantiasa memanfaatkan khazanah kearifan lokal ini kelihatan sangat efektif. Tanpa sadar, masyarakat terlibat dan digiring pada tujuan membangun budaya damai. Efektifitas yang ditunjukkan dalam mengkreasikan kearifan lokal ini dilakukan YLA Jatim ketika masyarakat Pacet melakukan Sedekah Bumi (*rumat deso*). Sebagian warga di Pacet, istilah ‘sedekah bumi’ jarang digunakan melainkan menggunakan istilah ‘ruwat deso’. Hajatan yang biasanya difasilitasi pemerintah desa dan warga ini dilaksanakan pada tanggal 1 Suro dalam penanggalan Jawa. Bahkan, di akhir-akhir usia program, di antara warga menyelenggarakan diskusi terbuka dengan mengambil tema “SKB menteri tentang pendirian rumah ibadat.” Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 berisi tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Diskusi ini, oleh YLA dianggap sebagai tolak ukur sekaligus monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat penerimaan warga terhadap program peace building. Hasilnya di luar dugaan, warga terlihat *enjoy* dan terbiasa dalam debat dengan mengangkat isu sensitive tersebut.

Sebagai bagian dari kearifan lokal, sedekah bumi muncul dalam tradisi Hindu-Islam. Tujuan utama dari gelaran acara ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur pada sang pencipta atas tanah, pertanian, dan kehidupan. Secara sederhana, sedekah bumi dalam lanskap kearifan ini senantiasa menjadi momentum ‘syukuran’. Dalam perkembangannya, sedekah bumi hanya menjadi bagian dari umat Muslim.

Oleh sebab itu, media kearifan lokal yang menjadi ritualitas masyarakat Pacet ini dikreasikan YLA Jatim untuk mengenalkan tentang nilai-nilai pluralism dan multikulturalisme. Secara sederhana, membangun perdamaian dengan memanfaatkan potensi lokal seperti ini tentu sangat efektif apalagi ritualitas Sedekah Bumi atau *rumat deso* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi masyarakat Pacet. Sebagai sebuah tradisi masyarakat Jawa, *rumat deso* menjadi salah satu instrumen membangun budaya damai di Pacet.

Dengan demikian, ritualitas sedekah bumi atau *rumat deso* ini menjadi media komunikasi lintas keyakinan dan agama. Sebab, secara substansial

sedekah bumi adalah ekspresi rasa syukur manusia atas pemberian Tuhan yang berupa tanah, pertanian, hewan dan kehidupan.¹⁶ Sehingga, semua manusia tanpa terkecuali memiliki kewenangan mensyukurinya. Selain menjadi bagian dari tradisi, sedekah bumi di Pacet juga menjadi media komunikasi antara agama yang berujung pada upaya pembangunan budaya damai (*peacebuilding*).

Kearifan lokal yang selama ini hanya diisi dengan suguhan pertunjukan Wayang Kulit, orkes Dangdut, dan Tahlil, dengan hadirnya Forum Warga (FW) yang diinisiasi YLA Jatim memberi warna baru dalam ritualitas tersebut. Selain agenda acara yang telah menjadi rutinitas warga, ada sisipan agenda yaitu do'a bersama. Dalam sesi do'a bersama ini, acara yang biasanya hanya didominasi umat Muslim ini juga diikuti oleh kelompok minoritas; baik Khatolik dan Kristen. Semua tokoh agama dan masyarakat umum hadir dalam do'a bersama tersebut, dan para tokoh agama juga diberikan kesempatan berdo'a selaras dengan kayakinannya.

Keterlibatan tokoh/masyarakat lintas agama dalam ritus tradisi ini memberikan implikasi terhadap sosialitas warga Pacet. Interaksi antar tetangga yang selama ini cenderung eksklusif, secara berangsur-angsur mulai ada keterbukaan komunikasi. Media kearifan lokal ini menjadi modal utama dalam membangun perdamaian.

Keempat, bertumpu pada kebutuhan local. Selain bertumpu pada kearifan local, media *peacebuilding* di Pacet adalah berbasis pada kebutuhan local. Sebagai daerah semi kota, problem yang senantiasa dialami adalah masalah sampah. Tumpukan sampah di Pacet ternyata menyita perhatian FW untuk segera diselesaikan. FW membentuk kesepakatan untuk saling menjaga kebersihan dan mengatur sirkulasi distribusi sampah yang kian hari mulai menumpuk. Selain penanganan masalah sampah, FW juga mengembangkan pertanian organic. Sebagian besar lahan desa Pacet berupa lahan pertanian sehingga sangat efektif untuk pengembangan pertanian organic. Selama ini, ksuburan tanah di Pacet mulai menurun karena gerusan pupuk kimia yang selama ini digunakan petani. Oleh sebab itu, pupuk organic menjadi penting demi menjaga tingkat kesuburan lahan pertanian; selain itu juga menjaga kualitas pertanian yang dihasilkan.

¹⁶ Lihat dalam www.servatius-kampungsawah.org, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010

Inisiasi *peace building* berbasis komunitas ini ialah sebuah pendekatan yang relative baru dalam membangun perdamaian. Tanpa menegasikan kerangka konseptual *peace building*, kerangka *peacebuilding* berbasis komunitas ialah meminjam kerangka konseptual *peacebuilding* dengan tanpa menanggalkan potensi dan kearifan lokal (*komunitas*). Walaupun demikian, YLA Jatim mengakui bahwa *peacebuilding* berbasis komunitas bukan konsep yang sama sekali baru. Beberapa lembaga yang bergerak dibidang perdamaian terlebih dahulu pernah melaksanakannya. Tapi, paling tidak di Jawa Timur, belum dijumpai lembaga yang memilih dan melakukan kerja perdamaian dengan pendekatan yang sama.

Dalam proses implementasi, *peacebuilding* berbasis komunitas tidak dapat diterapkan secara kaku. Melainkan, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan konteks, situasi dan kondisi dimana *peacebuilding* itu diterapkan. Sehingga, *peacebuilding* harus fleksibel dan kontekstual. Sebab: (1) melihat tensi potensi konflik yang ada dalam masyarakat, (2) karakter masing-masing masyarakat berbeda, (3) berusaha menggali kearifan lokal sebagai entry point menegakkan perdamaian.

Dengan penerapan *peacebuilding* model demikian, terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki. Keunggulan-keunggulan tersebut diantara lain; *Pertama*, partisipasi masyarakat lokal. Dalam konteks *peacebuilding* berbasis komunitas, pelaku perdamaian sebenarnya adalah masyarakat. Sedangkan lembaga YLA Jatim berposisi sebagai mediator.

Dengan mengandalkan komunitas lokal sebagai *peacebuilding*, maka kesadaran komunitas akan budaya damai dapat terinternalisir secara otomatis dan bukan melalui proses yang dipaksakan. Hal ini sebagai proses antitesa dari model pendekatan resolusi konflik melalui elit atau tokoh yang cenderung elitis dan kurang melibatkan komunitas *grassroot*. Pada saat dialog perdamaian dikumandangkan para tokoh, masyarakat *grassroot* tetap berada di jurang konflik.

Peacebuilding berbasis komunitas menempatkan masyarakat/komunitas lokal sebagai pilar-pilar perdamaian. Pendekatan demikian sekaligus sebagai jawaban atas kritik di atas. Idealnya, implementasi *peacebuilding* yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat lokal, budaya damai dapat terwujud secara lebih efektif dalam masyarakat bersangkutan.

Kedua, menggunakan media atau instrumen penyelesaian masalah lokal. Dengan instrumen penyelesaian masalah lokal bersama, maka masyarakat dapat berkumpul satu meja tanpa ada pembatas ideology, agama dan

keyakinan. Selain itu penyelesaian masalah lokal yang dihadapi bersama, akan menjauhkan perdebatan dogmatis dan mudah diterima oleh seluruh umat.

Dengan program *peacebuilding* berbasis komunitas dan dalam pelaksanaannya menggunakan media kebutuhan lokal, maka dapat membuka peluang lebih besar lagi; (1) komunikasi antar warga dan antar umat beragama dapat terjalin lebih intensif, (2) warga memiliki isu atau permasalahan bersama untuk bersatu mengatasinya, (3) meminimalisir perbedaan dan mencari titik temu, (4) mengurangi kecurigaan, prasangka dan sinisme antar umat beragama. Dari pengamatan peneliti terhadap beberapa capaian dalam program *peace building* yang dilakukan selama rentan waktu 5 tahun, ada target/capaian tertentu yang dijadikan pedoman kerja perdamaian di Pacet. Tiap periode memiliki capaian berbeda dengan periode sebelumnya. Pendek kata, sebagai sebuah proses, program *peace building* di Pacet bertolak pada logframe program *peace building* yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan narasi tekstual *peace building*. Lihat laporan program *peacebuilding* FLA-CRS Yogyakarta mulai tahun 2004-2008.

Budaya damai yang menjadi capaian ideal dalam implementasi *peacebuilding* bukan sesuatu yang instan. Budaya damai merupakan abstraksi dari keadaan yang guyub, rukun, menghormati perbedaan, gotong royong dan sebagainya. Kesadaran seseorang akan pentingnya mewujudkan budaya damai tidak dapat dipaksa dari luar atau melalui perjanjian hitam diatas putih. Melainkan, budaya damai harus dimulai dari tumbuhnya kesadaran masyarakat yang bersarang jauh dalam hati sanubari dan mengimplementasikannya melalui sikap jujur, percaya, terbuka dan penerimaan terhadap kelompok lain. Untuk itu, mewujudkan budaya damai membutuhkan proses dalam jangka waktu panjang, membutuhkan kerjasama sinergis antar stakeholder perdamaian. Kerja-kerja perdamaian juga harus tersusun rapi, terencana, sistematis, memiliki tahapan-tahapan dan komprehensif. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, *peacebuilding* berbasis komunitas memiliki prasyarat mewujudkan budaya damai dalam masyarakat.

kesimpulan

Peace building secara substansial adalah sebuah konsep perdamaian yang memiliki ruang yang sangat luas dan universal, sehingga tidak terikat oleh pendekatan (*approachment*), metoda (*menthod*), instrument (*tools*) tertentu yang digunakan. Karena *peacebuilding* berorientasi pada hasil bukan pada proses, serta mengutamakan pengaruh dan bukan tujuan.

Pendekatan, metode maupun instrument untuk pengembangan *peace building* yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, tidak secara otomatis dapat digunakan di ruang dan waktu yang lain. Karena segala perangkat yang digunakan untuk pengembangan *peace building* sangat tergantung pada kondisi social masyarakat yang didampingi. Oleh karena itu, Yayasan Lintas Agama (FLA) Jatim menggagas *peace building* berbasis masyarakat.

Pembentukan Forum Warga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi guna membangun komunikasi, dialog, serta Pencairan hubungan emosional antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Forum Warga ini sangat efektif untuk menjembatani antara pihak yang bertikai untuk menemukan Penyelesaian dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok. Terciptanya *common sence* inilah satu-satunya embrio bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai Implementasi pengembangan *peace building* melalui isu-isu populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan melalui *local wisdom* sangat efektif untuk membangun interaksi antar berbagai pihak dalam masyarakat dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang perlu konsep yang lebih matang dan terperinci, agar dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pengembangan potensi lokal (*local wisdom*) sebagaimana dimaksud adalah upaya-upaya untuk menggali berbagai nilai tradisi dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam lokal secara arif, bijaksana dan berkelanjutan untuk mendorong keadilan, kesejahteraan dan perdamaian komunitas.

Daftar Rujukan

- Wood, Bernard, *Development Dimensions of Conflict Prevention and Peace Building*, (New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-United Development Programme, 2003) dan CRS (pnyt), *Perangkat Membangun Perdamaian*, (Jakarta: CRS, 2002)
- Kusnanto Anggoro, dkk. *Post-Conflict Peacebuilding*, (Jakarta: ProPatria Institute, 2009)
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban* (terj. Asnawi dan Syafruddin), (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003)
- Abu Bakar, Irfan, *Menuju Paradigma Peace Building Pasca Kekerasan (Review terhadap Kerja-kerja Perdamaian di Daerah Konflik)*, dalam Jurnal Taswirul Afkar, Edisi No. 22 Tahun 2007.
- State of The World Forum, *People Building Peace, 35 Inspiring Stories from Around the World*, International Books, 1999
- Jacques Hallak, *Globalization, Human Rights and Education*, (Paris: UNESCO; International Institute for Educational Planning, 1999)
- Linda Low, "Implications of Globalization for Poverty Reduction Efforts in Asia and the Pacific", paper is presented at the *Asia and Pasific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Property Reduction, Manila, Asian Development Bank* (2001).
- Amir Syamsyuddin, "Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan", *Kompas*, 30 Juli 2004.
- Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan, kebangkitan Global Kekerasan Agama*, (Jakarta: Nizam Press, 2002).
- Khaled Aboe el-Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004)
- Rumadi, *Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara*, catatan pengantar dalam Suaedy, Ahmad Dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: the Wahid Institute, 2007).
- Henning Haugerudbraaten, *Peacebuilding: Six dimensions and two concepts* (African Security Review Vol. 7 No. 6 (1988)
- Zainul Abas, "Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian", dalam *Kompas*, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997.
- Laporan program *peacebuilding* FLA-CRS Yogyakarta mulai tahun 2004-2008
[http: www.Mojokertokab.go.id](http://www.Mojokertokab.go.id)